

# **TESIS**

**MANAJEMEN LABA: *GOOD CORPORATE GOVERNANCE,*  
BUDAYA NASIONAL & KORUPSI DALAM AGENCY COST  
(STUDI ANALISIS NEGARA ASIA TENGGARA)**

***EARNING MANAGEMENT: GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE, NATIONAL CULTURE AND CORRUPTION  
IN AGENCY COST  
(A STUDY IN SOUTHEAST ASIAN COUNTRY)***

**ANDI MUHAMMAD SYUKUR HIDAYATULLAH  
A062202022**



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

# **TESIS**

**MANAJEMEN LABA: *GOOD CORPORATE GOVERNANCE,*  
BUDAYA NASIONAL & KORUPSI DALAM *AGENCY COST*  
(STUDI ANALISIS NEGARA ASIA TENGGARA)**

***EARNING MANAGEMENT: GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE, NATIONAL CULTURE AND CORRUPTION  
IN AGENCY COST  
(A STUDY IN SOUTHEAST ASIAN COUNTRY)***

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar magister

disusun dan diajukan oleh

**ANDI MUHAMMAD SYUKUR HIDAYATULLAH  
A062202022**



Kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

**MANAJEMEN LABA : GOOD CORPORATE GOVERNANCE, BUDAYA NASIONAL & KORUPSI DALAM AGENCY COST (STUDI ANALISIS NEGARA ASIA TENGGARA)**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI MUHAMMAD SYUKUR HIDAYATULLAH  
A062202022**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister **Akuntansi** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 06 Maret 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

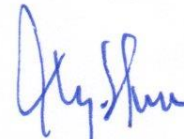
Pembimbing Utama



**Prof. Dr. Abdul Hamid Habbe, SE., M.Si**

**NIP. 19630515 199203 1 003**

Pembimbing Pendamping



**Dr. Syamsuddin, SE., Ak., M.Si., CA.**

**NIP. 19641012 198910 1 001**

Ketua Program Studi  
Magister Akuntansi



**Dr. Aini Indriawati, SE., Ak., M.Si., CA.**

**NIP. 19681125 199412 2 002**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



**Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.**

**NIP. 19640205 198810 1 001**

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Andi Muh. Syukur Hidayatullah  
NIM : A062202022  
Jurusan/ Program Studi : Magister Akuntansi

Menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa tesis yang berjudul:

**MANAJEMEN LABA: GOOD CORPORATE GOVERNANCE, BUDAYA  
NASIONAL & KORUPSI DALAM AGENCY COST  
(Studi analisis negara asia tenggara)**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ ditulis/ diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 2 dan pasal 70).

Makassar, 18 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Andi Muh Syukur Hidayatullah

## PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan kasih-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Manajemen Laba: *Good Corporate Governance*, Budaya Nasional & Korupsi dalam *Agency Cost* (Studi analisis negara asia tenggara)”, sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi (M.Ak.) pada program Strata Dua (S-2) Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Salam dan shalawat semoga senantiasa tercurah untuk nabi Muhammad SAW penunjuk segala laku dan ucap bagi umatnya.

Proses penyusunan tesis ini dilandasi dengan penuh kesungguhan dan kesabaran serta bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang tepat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin berterima kasih atas segala bantuan dan doanya kepada:

1. Kedua Orang tua peneliti. Juhri Ahmad Yusuf dan Andi Nurnaningsih, serta adik Andi Ummul Mutmainnah yang peneliti sangat yakini selalu mendoakan meskipun tak pernah terliskan.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Aini Indrijawati, S.E., M.Si., Ak., CA selaku ketua program studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid Habbe, SE., M.Si. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Syamsuddin, SE., Ak., M.Si., CA selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan hingga tesis ini dapat

terselesaikan. Terima kasih atas kesediaannya berbagi pengetahuan yang sangat berharga.

5. Bapak Prof. Dr. Arifuddin, SE., Ak., M.Si., CA, Ibu Dr. Andi Kusumawati, SE., Ak., M.Si., CA, dan Ibu Dr. R. A. Damayanti, SE., Ak., M.Soc., Sc., CA selaku tim penguji peneliti, terima kasih atas waktu, kesempatan, dan pengetahuan yang telah diberikan.
6. Pegawai akademik prodi Magister Akuntansi, Kemahasiswaan, dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar. Pak Hatta dan Ibu Susi dan seluruh staf lainnya yang telah membantu peneliti dalam kelancaran urusan akademik. Terima kasih atas segala bantuannya.
7. Teman seperjuangan Arnold, Dzakwan, dan Dion. Terima kasih atas supportnya sampai hari ini.
8. Keluarga besar Departemen Internal Audit Galesong Group Pak Herry, Kak Yanti, dan teman-teman lainnya yang telah memberi support selama menjalani masa kuliah
9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang dengan tulus memberikan semangat dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas segala doa dan bantuannya.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya.

Makassar, 10 Maret 2023

Peneliti

## ABSTRAK

ANDI MUHAMMAD SYUKUR HIDAYATULLAH. *Manajemen Laba: Good Corporate Governance, Budaya Nasional, dan Korupsi dalam Agency Cost (Studi Analisis Negara Asia Tenggara)* (dibimbing oleh Abul Hamid Habbe dan Syamsuddin).

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat biaya agensi berdasarkan budaya nasional dan tingkat korupsi, Peran dewan direksi independen dan komite audit independen terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Saham Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand periode tahun 2017 - 2019. Data penelitian diperoleh dari *annual report* yang dilaporkan oleh perusahaan, dan skor budaya nasional *Hofstede* serta *Corruption Perception Index* yang diterbitkan oleh *Transparency International*. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan analisis data berupa analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat biaya agensi yang dimiliki suatu negara berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba, sedangkan dewan direksi independen dan komite audit independen berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba dan secara simultan biaya agensi, dewan direksi independen, dan komite audit independen berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan *Institutional Theory*, bahwa dalam menghadapi masalah keagenan, perusahaan perlu meningkatkan tata kelola perusahaan (*formal institution*) yang baik untuk mendukung tingkat biaya agensi berdasarkan budaya nasional dan tingkat persepsi korupsi (*informal institution*) yang dikeluarkan oleh pemilik perusahaan sehubungan dengan pencegahan praktik manajemen laba.

Kata kunci: manajemen laba, *good corporate governance*, budaya nasional, korupsi, *agency cost*.



## ABSTRACT

ANDI MUHAMMAD SYUKUR HIDAYATULLAH. *Earning Management: Good Corporate Governance, National Culture, Corruption in Agency Cost (A Study in Southeast Asian Country)* (Supervised by Abdul Hamid Habbe and Syamsuddin).

The purpose on this study is to determine and analyze the effect of agency cost levels based on national culture and levels of perceptions of corruption, the role of an independent board of directors and independent audit communities on earnings management practices in companies listed on the stock exchanges of Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, and Thailand for the period 2017-2019. The research data were obtained from the annual report reported by the company, Hofstede's national cultural score, and the Corruption Perception Index published by Transparency International. This research was quantitative research with data analysis in the form of multiple linear regression analysis. The results show that the level of agency fees owned by a country has significant effect on earnings management practices. In contrast, the independent board of directors and independent audit committee have a significant impact on earnings management practices and agency costs. The independent board of directors and independent audit committee have a significant effect on earnings management practices. So it can be concluded, based on Institutional Theory, that in dealing with agency problems, companies need to improve good corporate governance (formal institutions) to support the level of agency costs based on national culture and the level of perceptions of corruption (informal institutions) issued by company owners in connection with preventing fraudulent earning management practices.

Keywords: earning management, good corporate governance, national culture, corruption, agency cost





## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Kegunaan Penelitian .....	11
1.4.1 Kegunaan Teoritis .....	11
1.4.2 Kegunaan Praktis .....	11
1.5 Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	14
2.1 <i>Agency Theory</i> .....	14
2.2 Budaya Nasional ( <i>National Culture</i> ) .....	15
2.2.1 <i>Power Distance</i> .....	16
2.2.2 <i>Individualism</i> .....	17
2.2.3 <i>Uncertainty Avoidance</i> .....	18
2.2.4 <i>Longterm Orientation</i> .....	18
2.3 Manajemen Laba ( <i>Earning Management</i> ) .....	19
2.3.1 <i>Conditional Revenue Model</i> (2010) .....	21
2.4 Biaya Agensi ( <i>Agency Cost</i> ) .....	22
2.5 Korupsi .....	24
2.6 <i>Good Corporate Governance</i> .....	25
2.7 Tinjauan Empiris .....	27
<b>BAB III KERANGKA KONSEPTUAL &amp; HIPOTESIS</b> .....	32
3.1 Kerangka Konseptual .....	32
3.2 Hipotesis Penelitian .....	33
3.2.1 Hubungan Manajemen Laba dan Biaya Agensi .....	33
3.2.2 Hubungan Manajemen Laba dan Dewan Direksi .....	35
3.2.3 Hubungan Manajemen Laba dan Komite Audit .....	36
3.2.4 Hubungan Manajemen Laba, CG, dan Biaya Agensi .....	37
<b>BAB IV METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	39
4.1 Rancangan Penelitian .....	39
4.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	40
4.3 Populasi dan Sampel Penelitian .....	40
4.3.1 Populasi Penelitian .....	40
4.3.2 Sampel Penelitian .....	40
4.4 Jenis dan Sumber Data .....	41

4.5 Teknik Pengumpulan Data .....	42
4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	42
4.6.1 Variabel Penelitian .....	42
4.6.1.1 Variabel Dependen .....	42
4.6.1.2 Variabel Independen .....	42
4.6.2 Definisi Operasional .....	43
4.6.2.1 Manajemen Laba ( <i>Earning Management</i> ) .....	43
4.6.2.2 Biaya Agensi ( <i>Agency Cost</i> ) .....	44
4.6.2.3 <i>Good Corporate Governance</i> .....	47
4.7 Metode Analisis Data.....	48
4.7.1 Analisis Univariat .....	48
4.7.1.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	49
4.7.2 Uji Asumsi Klasik .....	49
4.7.2.1 Uji Multikolinearitas .....	49
4.7.2.2 Uji Heteroskedastisitas .....	50
4.7.2.3 Uji Normalitas Data .....	50
4.7.2.4 Uji Autokorelasi .....	50
4.7.3 Analisis Multivariat .....	51
4.7.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda .....	51
4.7.3.2 Uji Hipotesis .....	51
4.7.3.2.1 Pengujian Koefisien Determinasi .....	51
4.7.3.2.2 Pengujian secara Parsial (Uji t) .....	52
4.7.3.2.3 Pengujian secara Simultan (Uji F) .....	53
<b>BAB V HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
5.1 Deskripsi Data .....	54
5.1.1 Kategori Biaya Agensi .....	54
5.1.2 Sampel Penelitian .....	55
5.2 Analisis Univariat (Analisis Deskriptif) .....	57
5.2.1 Analisis Deskriptif <i>Conditional Revenue Model</i> .....	57
5.2.2 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian .....	59
5.2.2.1 Manajemen Laba .....	59
5.2.2.2 Biaya Agensi .....	59
5.2.2.3 Dewan Direksi Independen .....	60
5.2.2.4 Komite Audit Independen .....	61
5.3 Uji Asumsi Klasik .....	61
5.3.1 Uji Multikolinearitas .....	61
5.3.2 Uji Heteroskedastisitas .....	62
5.3.3 Uji Normalitas Data .....	63
5.3.4 Uji Autokorelasi .....	65
5.4 Analisis Multivariat .....	66
5.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda .....	66
5.4.2 Pengujian Hipotesis .....	67
<b>BAB VI PEMBAHASAN .....</b>	<b>69</b>
6.1 Biaya Agensi berpengaruh terhadap Manajemen Laba .....	69
6.2 Dewan Direksi Independen berpengaruh terhadap Manajemen Laba .....	70
6.3 Komite Audit Independen berpengaruh terhadap Manajemen Laba.....	71

6.4 Biaya Agensi, Dewan Direksi Independen, dan Komite Audit Independen berpengaruh terhadap Manajemen Laba .....	72
<b>BAB VII PENUTUP</b> .....	74
7.1 Kesimpulan .....	74
7.2 Implikasi .....	76
7.3 Keterbatasan .....	76
7.4 Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	78
<b>LAMPIRAN</b> .....	85

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Asumsi Biaya Agensi .....	45
5.1 Skor Biaya Agensi .....	54
5.2 Penentuan Sampel Penelitian .....	55
5.3 Sampel Perusahaan .....	56
5.4 Analisis Deskriptif <i>Conditional Revenue Model</i> .....	57
5.5 Analisis Deskriptif Variabel .....	59
5.6 Analisis Multikolinearitas .....	62
5.7 Analisis Heterokedastisitas .....	63
5.8 Uji Normalitas ( <i>One-sample K-S</i> ) .....	64
5.9 Uji Autokorelasi (Uji <i>Durbin-Watson</i> ) .....	65
5.10 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda .....	66
5.11 Uji <i>Summary</i> .....	66
5.12 Uji ANOVA .....	66
6.1 Ringkasan Hasil Penelitian .....	69

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Grafik CPI negara ASEAN 2019-2021 .....	6
3.1 Kerangka Hipotesis .....	32
5.1 Analisis <i>Scatterplot</i> .....	63
5.2 Analisis Normalitas <i>P-Plot</i> .....	64

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang menjelaskan tentang kondisi keuangan dan perubahan yang terjadi akibat aktivitas operasional dan non operasional yang merefleksikan kinerja perusahaan dalam kurun periode tertentu untuk kemudian digunakan oleh *stakeholder* perusahaan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Salah satu indikator kinerja perusahaan yang tergambar dari laporan keuangan adalah Informasi laba yang dilaporkan oleh perusahaan. Agustia (2013) menjelaskan informasi laba merupakan perhatian utama yang digunakan oleh *stakeholder* dalam menilai kinerja dan prestasi perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan profit bagi perusahaan. Dalam perspektif investor, informasi laba dalam laporan keuangan menjadi indikator efisiensi dan efektifitas penggunaan modal yang diinvestasikan dalam perusahaan dalam bentuk tingkat pengembalian (*earning return*) dan menilai sejauh mana perusahaan memberikan peningkatan kemakmuran bagi pihak yang berinvestasi.

Berdasarkan *agency theory*, informasi laba yang dilaporkan oleh perusahaan seringkali menimbulkan problematika antara *principal* (pemilik modal) dan *agent* (manajemen), asumsi dasar yaitu terjadinya asimetri informasi yang berpotensi dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan. Selain itu, kecenderungan dari *stakeholder* yang terfokus pada informasi laba sebagai parameter untuk menilai kinerja perusahaan kemudian mendorong manajemen memanipulasi informasi keuangan yang dilaporkan.

Manajemen laba menurut Fisher & Rosenzweig (1995) adalah tindakan manajer untuk menaikkan atau menurunkan laba periode berjalan pada perusahaan tanpa menyebabkan kenaikan (penurunan) keuntungan ekonomi perusahaan secara jangka panjang. Manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan *judgement* (pertimbangan) dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk memanipulasi besaran (*magnitude*) laba yang dilaporkan kepada *stakeholder* berkaitan dengan kinerja ekonomi perusahaan pada periode tertentu maupun mempengaruhi perjanjian kontrak yang didasarkan pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan.

Praktik manajemen laba tidak selalu dalam orientasi penyajian tingkat laba yang lebih tinggi, Scott (2011) menyebutkan perusahaan cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus ditanggung oleh perusahaan seperti subsidi pemerintah, tarif pajak, tuntutan buruh dan lain sebagainya. Scott (2011) selanjutnya menjelaskan praktik manajemen laba dalam konteks penurunan laba dilakukan ketika tingkat profitabilitas perusahaan sangat tinggi dengan maksud agar tidak menjadi perhatian oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan melakukan pembebanan biaya-biaya perusahaan yang lebih besar sehingga berdampak pada penurunan laba perusahaan yang dilaporkan

Beberapa hasil penelitian menunjukkan praktik manajemen laba masih dilakukan oleh perusahaan di negara-negara asia tenggara. Penelitian yang dilakukan oleh Luez *et al.* (2003) memberikan hasil yaitu praktik manajemen laba oleh perusahaan di negara asia tenggara cenderung tinggi dimana negara Indonesia memiliki jumlah praktik manajemen laba yang lebih tinggi dibanding negara asia tenggara lainnya. Hasil penelitian serupa juga diberikan oleh Marlina (2017) dimana praktik manajemen laba oleh perusahaan-perusahaan di negara

Malaysia cenderung lebih rendah dibanding di negara Indonesia. Penelitian yang Haldiaz & Ratmono (2019) memberikan hasil dimana perusahaan telekomunikasi di negara asia tenggara dipengaruhi oleh ukuran perusahaan dan tingkat *leverage* yang dimiliki oleh perusahaan tersebut sehingga memiliki potensi untuk melakukan praktik manajemen laba.

Pada perspektif etika professional, Habbe *et al.* (2020) menyebutkan praktik manajemen laba menjadi salah satu keputusan etis yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dikarenakan manajer sebagai pihak pelaksana kebijakan pada perusahaan didorong oleh karakter pragmatis dan oportunistik sehingga manajer memilih untuk memanfaatkan masalah keagenan pada perusahaan untuk berperilaku tidak etis. Praktik manajemen laba dianggap sebagai perilaku pengambilan keputusan etis dalam perusahaan dikarenakan tindakan ini secara etika tidak dibenarkan tetapi juga bukan merupakan tindakan melanggar hukum karena praktik manajemen laba tidak secara langsung berdampak pada arus kas perusahaan dan penyalahgunaan aset perusahaan, oleh sebab itu praktik ini menghadapi dilema etika apakah praktik ini tidak melanggar secara hukum meskipun akan merugikan pihak lain. Perilaku ini dipengaruhi oleh faktor–faktor internal dan eksternal seperti budaya dalam stuktur masyarakat, lingkungan kerja, profesi, organisasi, hingga pengalaman yang bersifat personal.

Salah satu bentuk dari praktik manajemen laba adalah manajemen laba akrual dimana praktik ini merupakan bentuk perekayasaan laba perusahaan agar terlihat baik dalam persepsi investor melalui transaksi–transaksi perusahaan yang bersifat akrual. Yusnita (2019) dalam penelitiannya menjelaskan pemicu dari adanya praktik manajemen laba akrual disebabkan kebijakan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan berdasarkan pendekatan akrual dan diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Kebijakan penggunaan dasar



akrual ini dianggap lebih adil dan rasional untuk mengungkapkan informasi keuangan perusahaan yang sebenarnya.

Dalam menganalisis manajemen laba, Gumanti (2000) menjelaskan pendekatan *discretionary accruals* dimana pengakuan akrual laba atau beban yang bebas serta tidak diatur dan merupakan pilihan dari kebijakan manajemen. Yusnita (2019) menjelaskan beberapa model pengukuran dari *discretionary accruals* yang terdiri dari *Modified Jones Model*, *Kasznik Model*, *Performance Matched Discretionary Accruals Model*. Bentuk pengembangan dari pendeteksian praktik manajemen laba oleh perusahaan dikemukakan oleh Stubben (2010) dengan istilah *revenue discretionary*, pengukuran ini menguji dan membandingkan kemampuan *revenue discretionary* dan *accrual discretionary* dalam mengungkapkan besaran manajemen laba pada laporan keuangan perusahaan yang berimplikasi pada pengakuan piutang perusahaan.

Berdasarkan *agency theory*, dalam menghadapi konflik antara *principal* dan *agent* yang hadir pemilik modal akan mengeluarkan biaya-biaya dengan orientasi membuat manajemen perusahaan bertindak dan beroperasi sesuai dengan kepentingan investor. Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa sulit bagi para investor dapat memaksimalkan kekayaan atas operasional perusahaan tanpa mengeluarkan biaya-biaya untuk mendukung tujuan tersebut. Timbulnya biaya-biaya ini secara tidak langsung diharapkan menjadi stimulus bagi manajemen perusahaan agar setiap aturan dan kebijakan dalam operasional perusahaan selalu konsisten untuk memaksimalkan kinerja perusahaan sesuai dengan kepentingan investor.

Biaya keagenan (*agency cost*) menjadi biaya yang dikeluarkan oleh investor terkait bagaimana mereka mengawasi operasional perusahaan yang dijalankan oleh manajemen. Huu Nguyen *et al.* (2020) menjelaskan biaya keagenan adalah

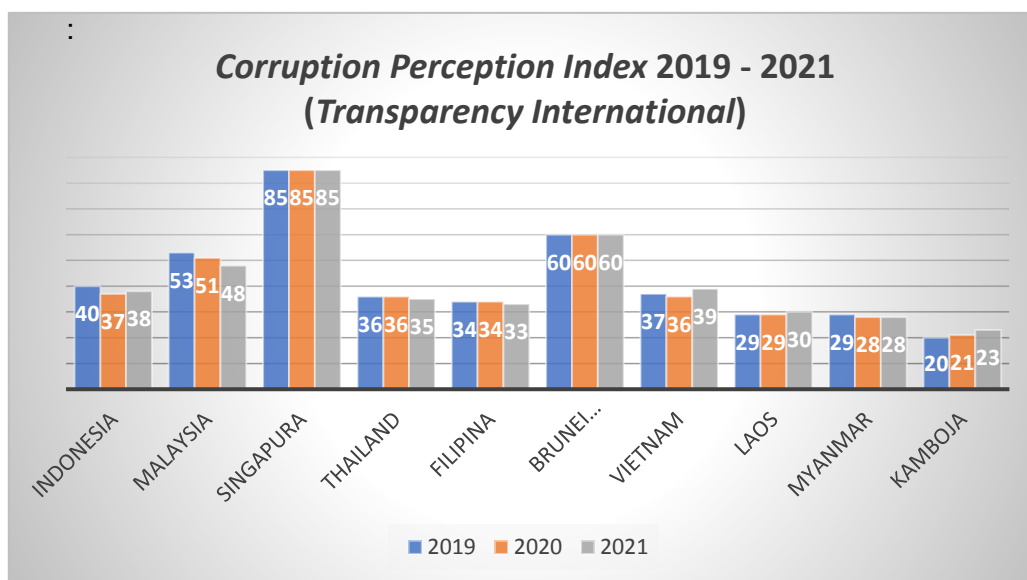
biaya internal perusahaan yang timbul untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara prinsipal dan agen dalam bentuk pengungkapan tindakan atau kebijakan yang tidak bertujuan untuk memaksimalkan potensi keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Biaya keagenan menjadi praktik yang dilakukan oleh prinsipal untuk mengatasi keterbatasan yang dimiliki oleh prinsipal dimana pihak prinsipal tidak dapat secara terus menerus mengontrol setiap aktivitas operasional manajemen sehingga hal tersebut dapat menimbulkan asimetri informasi.

Pada konteks negara berkembang, biaya agensi yang harus dikeluarkan oleh prinsipal dalam mengontrol aktivitas manajemen (*agent*) dipengaruhi oleh mekanisme dan kualitas hukum yang berlaku serta budaya pada negara tersebut. Putra *et al.* (2018) menjelaskan investor menggantungkan aktivitas investasi mereka kepada mekanisme hukum yang berjalan pada negara tempat mereka berinvestasi dimana hal ini diharapkan oleh para investor dapat mengurangi biaya-biaya yang tak perlu dikeluarkan berkaitan dengan perlindungan aset dan aktivitas investasi. Selain itu intervensi pemerintah melalui aturan dan kebijakan juga dapat mengurangi masalah keagenan yang timbul dalam perusahaan.

Tingkat persepsi korupsi pada suatu negara kemudian menjadi faktor yang mempengaruhi mekanisme ini dapat berjalan maksimal atau tidak. Dalam berbagai literatur, *World Bank* mendefinisikan Korupsi sebagai “*the abuse of public office for private gain*” atau perilaku penyalahgunaan oleh seseorang yang mewakili negara atau jabatan publik tertentu untuk keuntungan pribadi. Sedangkan *Transparency International* mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik, baik politikus, politisi maupun pegawai pemerintahan yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri dengan penyalahgunaan kekuasaan publik yang dipercayakan pada mereka.

*The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* yang merupakan organisasi yang bergerak di bidang pemeriksaan atas *fraud* pada suatu negara menjelaskan korupsi sebagai kecurangan yang sulit dideteksi khususnya pada negara–negara berkembang dikarenakan penegakan hukum yang lemah dan tata kelola organisasi yang masih dipertanyakan integritasnya.

Dalam *Corruption Perception Index (CPI)* tahun 2019 - 2021 yang dikeluarkan oleh *Transparency International*, dalam teritori negara - negara asia tenggara yang tergabung dalam ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*), hanya negara Singapura (85) dan Brunei Darussalam (60) yang konsisten memiliki skor diatas 50 poin sedangkan negara lainnya memiliki skor yang fluktuatif dan berada dalam rentang skor dibawah 50 poin sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas negara asia tenggara masih jauh dari kata bersih untuk kasus korupsi seperti yang tergambarkan pada Gambar 1.1



**Gambar 1.1 Grafik CPI negara ASEAN 2019–2021**

Lacker dan Tayan (2011) dalam penelitiannya menjelaskan tata kelola pelayanan publik dalam hal ini perlindungan aset bagi investor tidak akan berjalan baik jika tingkat korupsi pada negara tersebut dalam kategori tinggi. Sehingga,

tingkat korupsi yang lebih tinggi pada suatu negara dapat menjadi ukuran kualitas sistem hukum yang dimiliki oleh negara tersebut yang berimplikasi pada tingginya biaya agensi yang harus dikeluarkan oleh prinsipal ketika berinvestasi pada perusahaan di negara tersebut.

Selain tingkat persepsi korupsi, faktor dimensi budaya nasional menjadi salah satu determinan dalam fenomena *conflict of interest* khususnya praktik – praktik kecurangan dalam lingkup organisasi. Schwartz (1999) berpendapat “*Culture values in a country deliberately influences firms’ activity. These values also define particular priorities and ambitions of firms*”. Hal ini menjelaskan bagaimana faktor budaya yang merupakan bagian dari struktural masyarakat, turut mempengaruhi bagaimana organisasi dan perusahaan beroperasi secara benar atau tidak dalam menjalankan aktivitasnya. Wiseman *et al.* (2012) dalam penelitiannya menggeser asumsi “*self interest*” dimana motivasi agen dalam menentukan kebijakan yang berbeda dari yang diinginkan oleh prinsipal tidak hanya didorong oleh motif rasionalistik dan pribadi, tetapi merupakan implikasi dari aspek sosial yang hadir pada lingkungan organisasi. Sehingga aspek sosial khususnya budaya yang berlaku pada suatu negara menjadi faktor yang turut menentukan biaya agensi yang harus dikeluarkan oleh prinsipal karena perusahaan tidak terpisah dengan lingkungan masyarakat tempat dimana mereka beroperasi.

Salah satu pengukuran budaya dalam skala negara dikembangkan oleh Hofstede (2001) yang mendefinisikan budaya sebagai suatu sistem nilai-nilai kolektif yang membedakan negara yang satu dengan negara lainnya. Dalam menganalisis dan mengukur budaya nasional, *hofstede’s model* membagi pengukuran menjadi 4 (empat) indikator yang terdiri dari (1) *power distance*, (2) *individualism*, (3) *uncertainty avoidance*, dan (4) *long-term orientation* dimana

pengukuran ini merefleksikan struktur budaya yang berlaku dalam masyarakat sesuai dengan skor dari masing–masing indikator budaya nasional.

Huu Nguyen (2020) dalam penelitiannya menjelaskan faktor budaya yang berlaku dalam suatu negara dan sistem hukum yang dimiliki dapat membatasi dan meminimalisir biaya agensi (*agency cost*) yang harus dikeluarkan investor sehubungan dengan mencegah praktik manajemen laba. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Malinowska (2019) dimana peneliti menjelaskan faktor–faktor yang mempengaruhi keputusan keuangan baik dalam lingkup individu dan organisasi tidak hanya faktor ekonomi formal biasa, aspek informal seperti nilai budaya, struktur dan produk hukum yang diberlakukan dalam suatu negara turut mempengaruhi keputusan–keputusan keuangan yang akan diterapkan.

Berdasarkan teori keagenan, dalam meminimalisir praktik-praktik penyimpangan yang terjadi dalam perusahaan akibat adanya asimetri informasi yang terjadi antara *principal* dan *agent*, penerapan praktik tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang baik menjadi kewajiban dalam suatu perusahaan sehubungan dengan pengawasan atas operasional yang dijalankan oleh manajemen perusahaan. *Corporate governance* merupakan prinsip yang ditetapkan secara formal oleh organisasi baik dalam konteks privat maupun publik. Prinsip ini memiliki tujuan untuk memaksimalkan *value* organisasi, meningkatkan kinerja, hingga keberlanjutan organisasi secara jangka panjang. Kepentingan setiap *stakeholder* yang memiliki peran dan orientasi berbeda menjadi poin utama yang dipertimbangkan dalam menjalankan praktik *corporate governance*.

Konsep pengelolaan perusahaan dengan pendekatan *Good Corporate Governance* dikarenakan berbagai problematika tata kelola perusahaan seperti masalah *fraud* yang terjadi dalam internal perusahaan, benturan kepentingan

setiap *stakeholder* hingga mengancam eksistensi perusahaan tersebut. Beberapa aspek yang diukur untuk melihat implementasi praktik *corporate governance* adalah (1) hadirnya posisi dewan direksi yang bertanggungjawab dalam pemberian nasihat dan kebijakan strategis secara luas serta menjalankan fungsi *controlling* atau pengawasan terhadap kebijakan dan aturan yang berlaku pada perusahaan dan keterkaitannya dengan operasional perusahaan, (2) independensi dewan turut menjadi faktor yang dinilai dari tujuannya untuk menjaga reputasi perusahaan, (3) ukuran komite audit dengan tugas untuk mencegah praktik kecurangan yang terjadi dalam perusahaan serta mengawasi kinerja dari perusahaan, dan (4) independensi komite audit dimana aspek ini menentukan sejauh mana prinsip akuntabel dan transparansi oleh peran komite audit dalam mengatasi masalah dalam pengendalian internal perusahaan dengan tujuan untuk melindungi reputasi dan kredibilitas perusahaan.

Praktik tata kelola perusahaan (*corporate governance*) cenderung sulit diterapkan secara merata oleh perusahaan pada negara berkembang dibanding dengan negara maju dikarenakan negara berkembang cenderung masih didominasi oleh nilai-nilai sosial yang cukup tinggi, institusi (formal & informal) yang lemah, serta kebijakan perlindungan investor yang tidak konsisten sehingga menimbulkan biaya agensi yang berbeda pada setiap perusahaan. Arslan *et al.* (2020) dalam penelitiannya memberikan hasil dimana kualitas *corporate governance* yang dijalankan oleh perusahaan pada suatu negara tertentu ditentukan oleh aspek budaya yang berlaku pada negara tersebut, kebijakan dan aturan hukum yang ditegakkan khususnya yang berkaitan dengan korupsi, serta beberapa instrumen institusional lainnya sehingga praktik kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan sangat bergantung dari kualitas tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang dijalankan oleh perusahaan serta biaya

agensi yang harus dikeluarkan oleh prinsipal melihat kondisi budaya dan praktik hukum yang dijalankan oleh setiap negara.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dilakukan penelitian dengan judul “Manajemen Laba: *Good Corporate Governance*, Budaya Nasional & Korupsi dalam *Agency Cost* (Studi analisis negara asia tenggara)”. Penelitian ini melanjutkan peneltian yang dilakukan oleh Putra (2018) terkait pengaruh biaya agensi (*agency cost*) terhadap praktik manajemen laba (*earning management*) pada perusahaan-perusahaan di negara asia tenggara.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah biaya agensi (*agency cost*) berdasarkan tingkat persepsi korupsi dan budaya nasional berpengaruh terhadap praktik manajemen laba perusahaan?
2. Apakah dewan direksi independen berpengaruh terhadap praktik manajemen laba perusahaan?
3. Apakah komite audit independen berpengaruh terhadap praktik manajemen laba perusahaan?
4. Apakah biaya agensi, dewan direksi independen dan komite audit independen berpengaruh terhadap praktik manajemen laba perusahaan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh biaya agensi (*agency cost*) berdasarkan budaya nasional dan tingkat persepsi korupsi terhadap praktik manajemen laba perusahaan.

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh dewan direksi independen terhadap praktik manajemen laba perusahaan.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh komite audit independen terhadap praktik manajemen laba perusahaan.
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh biaya agensi (*agency cost*), dewan direksi independen, dan komite audit independen terhadap praktik manajemen laba perusahaan.

## **1.4 Kegunaan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian yang dilakukan memberikan kontribusi pengembangan kajian pada persoalan ekonomi berdasarkan *agency theory* dimana penelitian ini berfokus pada perbedaan budaya nasional dan tingkat korupsi mempengaruhi perilaku manajemen perusahaan (*agent*) terkait praktik manajemen laba dimana topik ini masih memiliki diperdebatkan oleh beberapa peneliti. Penelitian ini turut mengembangkan kajian empiris terkait masalah dan konflik prinsipal–agen berdasarkan *agency theory*, dimana faktor–faktor sosial, hukum, kualitas praktik tata kelola perusahaan (*corporate governance*) turut berperan atas permasalahan ini sehingga penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian–penelitian selanjutnya yang membahas tentang *agency theory* dan praktik–praktik kecurangan ekonomi lainnya.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan acuan dan pertimbangan untuk setiap *stakeholder* yang terlibat dalam proses pencegahan tindakan kecurangan pada sektor privat maupun pemerintahan sebagai pengambil kebijakan. Sejalan dengan *agency theory*, kebijakan terkait pelaksanaan pencegahan pratik kecurangan



keuangan diharapkan mempertimbangan aspek sosiologi khususnya kolaborasi institusi formal dan informal untuk implikasi yang lebih baik. Penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan bagi para investor / pemilik saham pada perusahaan-perusahaan di negara berkembang terkait keputusan ekonomi yang akan diambil baik yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang sehubungan dengan biaya agensi (*agency cost*) yang timbul serta praktik tata kelola perusahaan yang diterapkan oleh perusahaan terkait.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mengacu pada penulisan tesis dan disertasi yang dikeluarkan oleh program Magister dan Doktor Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2013). Penelitian ini terdiri dari tujuh bab yang saling berkesinambungan.

**Bagian pertama** yaitu Bab Pendahuluan atau Bab I menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

**Bagian kedua** yaitu Bab II menjelaskan tinjauan pustaka yang berisi teori, konsep, dan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai kajian pustaka dalam melakukan penelitian.

**Bagian ketiga** yaitu Bab III yaitu kerangka pemikiran dan hipotesis. Bab ini berisi kerangka pemikiran yang merupakan dasar pembangunan. Kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara konsep yang diteliti. Bab ini juga menguraikan hipotesis penelitian yang merupakan jawaban sementara atas pertanyaan-pertanyaan penelitian.

**Bagian keempat** adalah Bab IV yaitu metodologi penelitian. Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang meliputi rancangan penelitian, situs

dan waktu penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian serta teknik analisis data.

**Bagian kelima** adalah Bab V hasil penelitian, menguraikan deskripsi data penelitian dan menyajikan hasil pengolahan data.

**Bagian keenam** adalah Bab VI pembahasan, bab ini menguraikan pembahasan dari tiap variabel atas hasil penelitian berkenaan dengan rumusan masalah dan hipotesis yang telah dirumuskan kemudian dibandingkan dengan tujuan penelitian beserta teori yang mendasarinya.

**Bagian ketujuh** adalah Bab VII penutup, menguraikan tentang kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian dan saran yang berkaitan dengan penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Agency Theory**

Jensen & Meckling (1976) menjelaskan *Agency Theory* sebagai relasi keagenan antara investor (*principal*) dan manajemen (*agent*) yang terikat dalam kesepakatan kerjasama dimana investor melibatkan pihak lain yang bertugas untuk melakukan beberapa pekerjaan dalam bentuk peodelegasian wewenang dan pengambilan keputusan sehubungan dengan operasional perusahaan. *Agency theory* dikontekskan pada fenomena terjadinya konflik kepentingan antara investor dan manajemen dalam perusahaan.

Teori ini menjelaskan situasi persaingan bisnis menyebabkan praktik-praktik yang menyimpang dari kesepakatan dikarenakan motif individu tertentu yang bersifat rasional dan berujung pada proses pengambilan dan penerapan keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Jensen & Meckling (1976) mengatakan asumsi dasar dari *agency theory* adalah potensi *utility maximize* dimana terdapat kesempatan yang lebih besar bagi pihak manajemen untuk memaksimalkan kepentingannya sehingga memanfaatkan berbagai celah dari adanya pelimpahan wewenang yang diberikan oleh investor untuk mencapai tujuan tersebut.

Konflik yang terjadi antara pemilik perusahaan dan manajemen dalam suatu perusahaan disebabkan adanya asimetri informasi dimana manajemen menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh investor khususnya yang berkaitan dengan pengukuran kinerja operasional dan keuangan.

Eisenhardt (1989) menyatakan terdapat 3 (tiga) asumsi dasar manusia yang menyebabkan terjadinya konflik keagenan yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan kepentingan pribadi (*self-interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), (3) manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*) sehingga berdasarkan 3 (tiga) asumsi dasar ini, setiap individu akan selalu bertindak oportunistik dan mementingkan kepentingan pribadinya

Berdasarkan *agency theory*, faktor-faktor yang menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*) dalam suatu perusahaan adalah: (1) tata kelola perusahaan (*corporate governance*) tidak diimplementasikan dengan maksimal, (2) *stakeholder* tidak memiliki kebijakan terkait pengawasan yang bersifat independen dalam menilai kinerja manajemen, dan (3) manajemen memberikan informasi yang tidak transparan dan akuntabel kepada pemilik perusahaan sehubungan dengan target kinerja yang dicapai, serta (4) ketidakselarasan tujuan yang ingin dicapai oleh pemilik perusahaan dan manajemen khususnya yang bersifat *risk sharing*.

Salah satu implikasi yang timbul akibat dari masalah keagenan dalam perusahaan yaitu pemilik perusahaan mengeluarkan biaya keagenan (*agency cost*) dengan tujuan memantau manajemen. Biaya keagenan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kewajaran informasi yang diberikan oleh manajemen kepada pemilik saham serta dapat melakukan pencegahan dini terkait berbagai potensi penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam perusahaan.

## **2.2 Budaya Nasional (*National Culture*)**

Geert Hofstede adalah seorang psikolog sosial dari Belanda yang memfokuskan tulisan ilmiahnya pada studi budaya antar negara. Menurut

Hofstede (2011) “*a collective programming of the mind that distinguishes the member of one group or category of people from another*”. Hofstede mencoba menunjukkan bahwa setiap individu berbeda, dimana perbedaan budayalah yang menyebabkan perbedaan prespektif dalam hidup dan tindakan individu tersebut.

Salah satu pencapaian Hofstede yang paling terkenal ialah pembentukan teori dimensi budaya nasional (*national culture theory*), yang menyediakan kerangka kerja yang dapat diukur secara universal untuk menilai budaya-budaya yang dimiliki sebuah negara. Hofstede mengembangkan 4 (empat) dimensi budaya, yaitu (1) jarak kekuasaan (*power distance*), (2) penghindaran ketidakpastian (*uncertainty avoidance*), (3) individualisme (*individualism*), dan (4) orientasi jangka panjang (*long-term orientation*).

### **2.2.1 Jarak Kekuasaan (*Power Distance*)**

Dimensi *power distance* berkaitan dengan ketidaksetaraan (*inequality*) yang terjadi dimana semua individu dalam masyarakat dinilai tidak setara dalam hal kekuasaan, dan bagaimana sikap suatu budaya mengekspresikan ketidaksetaraan kekuasaan tersebut. Hal tersebut berdasarkan fakta bahwa setiap individu itu unik dan menyiratkan bahwa kita semua tidak setara. Salah satu aspek yang paling menonjol dari ketidaksetaraan adalah tingkat kekuasaan yang diberikan atau dapat diberikan oleh satu individu terhadap individu lainnya dan hal ini didefinisikan menjadi sejauh mana seseorang mampu mempengaruhi ide-ide dan perilaku orang lain.

Lebih lanjut Hofstede (2011) mendefinisikan *power distance* sebagai sejauh mana anggota organisasi yang lemah secara kekuasaan dalam suatu negara memiliki praduga bahwa kekuasaan didistribusikan secara tidak merata kepada

setiap individu. Dimensi Ini juga berkaitan dengan fakta bahwa ketidaksetaraan di masyarakat didukung oleh para bawahan dan juga oleh para pemimpin.

Pada negara yang memiliki *power distance* yang tinggi, masyarakat menerima hubungan kekuasaan yang lebih *autocratic* dan *paternalistic*. Pihak yang memiliki akses kekuasaan lebih tinggi dilihat *autocratic* atau *paternalistic* dimana masyarakat kemudian cenderung takut untuk mengungkapkan ketidaksetujuan dengan pihak kekuasaan. Pengambilan keputusan pada suatu negara dengan *Power Distance* yang tinggi lebih mengharapkan pihak yang berkuasa mengambil keputusan secara otokratis atau paternalistik (*autocratically or paternalistically*) dibandingkan dengan mengambil keputusan dengan cara konsultatif.

### **2.2.2 Individualisme (*Individualism*)**

*Individualism* sering digunakan untuk melihat sejauh mana suatu budaya menilai individualitas diatas dari kelompok sosial. Hofstede (2011) menggunakan individualisme sebagai kebalikan atau lawan dari kolektifisme (*individualism vs collectivism*).

Pada budaya *individualism* masyarakat dicirikan memiliki ikatan antar individu yang renggang (*loose*). Individu-individu dalam masyarakat cenderung lebih memperhatikan diri sendiri dan keluarga terdekatnya. Sedangkan *collectivism* sebagai kebalikan dari individualism berkaitan dengan masyarakat di mana ikatan antar individu sangat erat dimana individu sejak lahir dan seterusnya diintegrasikan ke dalam kelompok yang kuat, kohesif, dan senantiasa melindungi kelompok mereka dengan imbalan kesetiaan yang tidak dipertanyakan. Posisi masyarakat pada dimensi ini tercermin dalam citra diri seseorang yang didefinisikan dalam istilah "aku" atau "kita".

### **2.2.3 Penghindaran Ketidakpastian (*Uncertainty Avoidance*)**

Menurut Hofstede (2011) *Uncertainty avoidance* dapat didefinisikan sebagai sejauh mana anggota dalam suatu budaya merasa terancam oleh situasi yang ambigu atau tidak diketahui. Hal tersebut diekspresikan melalui kecemasan (*anxiety*) tentang apa yang akan terjadi dan kebutuhan akan aturan tertulis dan tidak tertulis.

*Uncertainty avoidance* hampir mirip namun sedikit berbeda dengan *risk avoidance*. *Uncertainty* didasarkan kepada resiko (*risk*) seperti kecemasan yang didasarkan pada ketakutan (*fear*). Ketakutan dan resiko sama-sama berfokus pada suatu yang spesifik dimana sebuah objek jika berkaitan dengan ketakutan, dan sebuah peristiwa berkaitan dengan resiko. Resiko sering dinyatakan sebagai sebuah probabilitas bahwa sesuatu akan terjadi sedangkan kecemasan dan ketidakpastian merupakan perasaan yang bercampur dan tidak didasarkan pada objek atau probabilitas terkait sesuatu akan terjadi, yang dimana merupakan sebuah situasi dimana segala sesuatunya masih mungkin terjadi (*ambiguity situation*).

### **2.2.4 Orientasi Jangka Panjang (*Longterm Orientation*)**

Dimensi ini mengukur hubungan antara masa lalu, sekarang, dan masa depan. Hofstede (2011) menjelaskan bahwa masyarakat dengan orientasi jangka panjang cenderung menjunjung tinggi nilai penting dalam pekerjaan seperti kejujuran, akuntabilitas dan mampu beradaptasi dengan perubahan serta lebih memiliki tujuan jangka panjang. Disisi lain masyarakat dengan orientasi jangka pendek cenderung menjunjung tinggi nilai penting dalam pekerjaan seperti kebebasan, pencapaian, memikirkan diri sendiri dan lebih mempertahankan

norma yang sudah ada dan memandang perubahan sebagai sesuatu yang mencurigakan serta lebih memiliki tujuan jangka pendek.

### **2.3 Manajemen Laba (*Earning Management*)**

Scott (2011) mendefinisikan manajemen laba sebagai “*the choice by a manager of accounting policies so as to achieve some specific objective*” dimana praktik ini dilakukan oleh manajemen melalui kebijakan–kebijakan akuntansi tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu, seperti meningkatkan dan menurunkan laba yang dilaporkan pada kurun waktu tertentu ataupun mengurangi tingkat kerugian yang dialami perusahaan sehubungan dengan kinerja dari manajemen. Sedangkan Healy & Wahlen (1999) mendefinisikan manajemen laba sebagai praktik dimana manajer menggunakan penilaian (*judgement*) dalam pelaporan keuangan dan menyusun serta mengubah transaksi–transaksi yang dilaporkan dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk menyesatkan beberapa pemangku kepentingan yang menggunakan informasi tersebut sebagai pengambilan keputusan, mempengaruhi hasil kontrak yang didasarkan pada hasil yang dilaporkan pada laporan keuangan, hingga kepentingan kinerja ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan.

Praktik manajemen laba didorong oleh beberapa motivasi diantaranya : (1) motivasi bonus, manajer akan berusaha mengatur laba bersih yang diperoleh perusahaan dengan sedemikian rupa agar dapat memperoleh bonus maksimal atas laba bersih tersebut, (2) hipotesis perjanjian utang (*debt covenant hypothesis*), dimana laba bersih yang diatur oleh manajemen dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran persyaratan–persyaratan hutang yang dipenuhi oleh kreditur, (3) *meet investors earning expectations and maintain reputation*, praktik pengaturan laba yang dilakukan oleh manajemen diharapkan melebihi ekspektasi



dari investor sehingga akan menjadi signal kepada investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan dengan prediksi perusahaan akan menjadi lebih baik dimasa yang akan datang. (4) IPO (*initial public offering*), khusus perusahaan yang akan melantai pada bursa saham, manajemen termotivasi untuk melakukan praktik manajemen laba dengan tujuan untuk meningkatkan laba perusahaan yang dilaporkan dengan harapan peningkatan laba ini akan mendorong peningkatan harga saham yang akan dimiliki oleh perusahaan.

Scott (2011) membagi 4 (empat) jenis manajemen laba, yaitu (1) *Taking a bath*, dimana manajemen menjadikan laba perusahaan pada periode berjalan menjadi lebih rendah (bahkan cenderung merugi) dibandingkan laba perusahaan periode sebelumnya. (2) *Income Minimazation* adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih rendah daripada laba sesungguhnya. *Income Minimazation* biasanya dilakukan pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi dengan maksud agar tidak mendapat perhatian secara politis. (3) *Income Maximization*, merupakan pola manajemen laba dimana pelaporan laba perusahaan pada periode berjalan menjadi lebih tinggi dengan cara mempercepat pencatatan pendapatan, menunda biaya hingga memindahkan biaya ke periode selanjutnya dengan tujuan untuk menghindari pelanggaran perjanjian hutang dengan kreditur. (4) *Income Smoothing*, merupakan salah satu bentuk manajemen laba yang dilakukan dengan cara membuat laba akuntansi relatif konsisten dalam beberapa periode. Manajemen dengan sengaja menurunkan atau meningkatkan laba untuk mengurangi gejolak dalam pelaporan laba sehingga perusahaan terlihat stabil atau tidak beresiko tinggi.

### 2.3.1 *Conditional Revenue Model*

Salah satu model pengukuran praktik manajemen laba yang lazim digunakan adalah *Jones Model* yang pertama kali diperkenalkan tahun 1991 dimana Dechow *et al.* (1995) melakukan pengembangan atas *Jones Model* tersebut dengan istilah *Modified Jones Model* dengan menggunakan agregat akrual dimana secara keseluruhan dilihat dari pergerakan selisih antara perubahan piutang dan pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan dapat mengontrol penggunaan laba tersebut. Stubben (2010) selanjutnya memperkenalkan suatu alat pendeteksian manajemen laba yaitu *Discretionary Revenue Model* dimana secara garis besar menggunakan komponen utama pendapatan yaitu piutang untuk memprediksi praktik manajemen laba. Adanya pengembangan model ini dikarenakan menurut Stubben (2010) terdapat kelemahan dari *Modified Jones Model* seperti *cross-sectional* yang secara tidak langsung mengasumsikan bahwa perusahaan dalam industri yang sama menghasilkan proses akrual yang sama. Selain itu model akrual juga tidak menyediakan informasi untuk komponen mengelola laba perusahaan dimana model akrual tidak membedakan peningkatan diskresioner pada laba melalui pendapatan atau komponen beban.

Terdapat 2 (dua) formula perhitungan untuk pendeteksian manajemen laba dalam *Discretionary Revenue Model* yaitu: (1) *Revenue Model*, model ini menitikberatkan pada pendapatan yang memiliki hubungan secara langsung dengan piutang. (2): *Conditional Revenue Model*, model ini dikembangkan kembali dengan adanya penambahan ukuran perusahaan (*size*), umur perusahaan (*age*), dan margin kotor (*gross revenue margin*) yang diduga dapat digunakan dalam mendeteksi manajemen laba akrual mengenai pemberian kredit yang berhubungan dengan piutang (Sari dan Ahmar, 2014).

Penelitian yang mendukung *revenue discretionary model* yang dikembangkan oleh Stubben (2010) dalam mendeteksi praktik manajemen laba perusahaan dilakukan oleh Ahmar *et al.* (2016) terkait model manajemen laba berdasarkan implementasi *International Financial Reporting Standard* (IFRS) pada perusahaan di Indonesia & Call (2014) terkait komparasi *revenue discretionary model* dan *accrual discretionary model* dimana conditional revenue model yang dikembangkan oleh Stubben (2010) menimalisir terjadi bias dalam pendeteksian manajemen laba perusahaan dikarenakan model ini berfokus pada faktor pendapatan yang dilaporkan oleh perusahaan dan implikasinya terhadap piutang yang tercatat pada laporan keuangan. Suyono (2017) dalam studi literturnya terkait model manajemen laba menjelaskan *revenue discretionary model* dari Stubben (2010) memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dalam mendeteksi manajemen laba dikarenakan dapat kelemahan dari *accrual discretionary model* khususnya terkait asumsi nilai akrual yang tidak dapat dijelaskan oleh proyeksi linier pada objek penelitian yang diamati.

#### **2.4 Biaya Agency (Agency Cost)**

Jensen & Meckling (1976) menjelaskan biaya agensi (*Agency Cost*) merupakan biaya atau pengeluaran yang hadir dari adanya divergensi antara pemilik perusahaan dan manajemen. Manajemen (*agent*) cenderung lebih berpotensi melakukan praktik yang memaksimalkan keuntungan pribadi bagi mereka daripada memaksimalkan keuntungan kepada pemilik (*principal*) dalam jangka panjang. Man (2021) dalam penelitiannya menyebutkan, akibat adanya permasalahan agensi ini yang kemudian menimbulkan biaya agensi yang tidak sedikit, sebagian negara maju mulai mengembangkan model tata kelola manajemen yang bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan pemilik dan

manajemen menjadi lebih baik dan sejalan untuk mengurangi pengambilalihan manajerial oleh manajemen.

Li & Wang (2020) dalam penelitiannya terkait *moral hazard* dan biaya agensi menyimpulkan bahwa tingginya biaya agensi (*agency cost*) dipengaruhi oleh masalah *moral hazard* yang terjadi pada perusahaan-perusahaan dengan kinerja tidak efisien, dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa biaya agensi akan selalu hadir dalam suatu perusahaan dikarenakan pertumbuhan kinerja perusahaan diiringi dengan celah manajemen dapat melakukan praktik yang menguntungkan secara individu dan dapat memberikan efek merugikan bagi perusahaan jika tidak dilakukan fungsi pengontrolan dan pengawasan. Faktor eksternal perusahaan seperti lingkungan, hukum dan kebijakan, serta budaya turut mempengaruhi besaran biaya agensi dikarenakan masalah *moral hazard* yang dimiliki oleh manajemen turut dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.

Boateng (2018) dalam penelitiannya terkait budaya nasional dan praktik korupsi dengan studi analisis lintas negara memberikan hasil penelitian dimana karakteristik tertentu dalam suatu negara yang telah menjadi budaya dalam suatu negara turut memberikan pengaruh bagaimana perusahaan beroperasi khususnya melakukan praktik-praktik yang tidak sejalan dengan keinginan *stakeholder*, hal ini dikarenakan potensi praktik kecurangan yang terjadi ditentukan dari bagaimana interaksi yang terjadi antara individu dan kelompok pada lingkungan dimana perusahaan tersebut beroperasi. Hal ini sejalan dengan pemikiran Schwartz (1999) dimana nilai-nilai yang berlaku dalam suatu struktur masyarakat secara luas turut mempengaruhi bagaimana perusahaan tersebut beraktivitas dan sejauh mana perusahaan tersebut beroperasi dengan mempertimbangkan kepentingan prinsipal.

Selain pengaruh budaya yang mempengaruhi biaya agensi yang berlaku dalam suatu perusahaan. Praktik tata kelola publik dalam suatu negara juga turut menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku investor khususnya terkait pengawasan dan pengontrolan yang harus dilakukan untuk menjaga kepentingan mereka selalu dilaksanakan oleh manajemen dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan. Dimant (2016) menjelaskan bahwa praktik–praktik kecurangan salah satunya korupsi turut mempengaruhi perusahaan yang beraktivitas pada lingkungan tersebut memanfaatkan potensi dari lemahnya sistem hukum dan sosial yang menyebabkan praktik korupsi dipersepsikan tinggi. Selanjutnya Dimant (2016) menjelaskan bahwa praktik korupsi yang dilakukan baik secara individu maupun kolektif tidak hanya dipengaruhi oleh faktor rasionalisasi dan perspektif perilaku dari setiap individu, faktor sosiologis, ekonomi, politik dan hukum yang berlaku dalam suatu lingkungan tersebut turut mempengaruhi bagaimana praktik tersebut dapat terus terjadi. Oleh sebab itu faktor budaya dan tingkat korupsi yang terjadi dalam suatu negara yang merupakan faktor eksternal dari perusahaan kemudian menentukan tingkat biaya agensi (*agency cost*) untuk meminimalisir konflik prinsipal – agen yang terjadi dalam perusahaan tersebut.

## **2.5 Korupsi**

Menurut *Transparency International*, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Korupsi adalah fenomena yang menyebar di seluruh dunia dan didefinisikan sebagai kejahatan menyalahgunakan kepemilikan oleh pejabat pemerintah untuk keuntungan pribadi. Korupsi umumnya mengacu pada kekuasaan diskresioner entitas sektor publik yang mempengaruhi cara kerja administrasi publik, yaitu penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi (*World Bank Group*).

Cuadrado-Ballesteros (2019) menjelaskan eksistensi dari korupsi tidak dapat dilihat dari faktor ekonomi semata, faktor politik yang berkaitan dengan bagaimana penyelenggaraan pemerintah dan kestabilan politik dalam suatu negara menentukan tingkat korupsi pada negara tersebut. Sistem hukum yang diberlakukan dalam suatu negara juga memberi dampak terkait meluasnya praktik korupsi, lemahnya sistem hukum dan perlindungan atas praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum tertentu memberikan akses korupsi menjadi lebih mudah bukan hanya pada lingkup kebijakan publik, sektor bisnis kemudian melakukan hal serupa dimana praktik korupsi dilakukan baik untuk kepentingan perusahaan maupun oknum dalam perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi. Dilihat dari faktor ekonomi makro, praktik korupsi cenderung lebih tinggi pada negara–negara dengan ekonomi rendah berkembang dikarenakan sistem ekonomi yang dijalankan pada negara–negara tersebut masih meninggalkan masalah kesenjangan ekonomi yang terjadi pada struktur masyarakat sehingga melanggengkan praktik penyimpangan yang terjadi pada negara–negara tersebut.

## **2.6 Good Corporate Governance**

*Good Corporate Governance* merupakan prinsip–prinsip yang ditetapkan secara formal oleh organisasi baik pada sektor privat maupun publik. Prinsip ini memiliki tujuan untuk memaksimalkan value perusahaan, meningkatkan kinerja, hingga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang. Kepentingan setiap *stakeholder* yang memiliki peran menjadi poin utama yang harus dipertimbangkan selain transparansi.

*Cadbury Committee of the United Kingdom* mendefinisikan *Corporate Governance* yaitu "A set of regulations governing the relationship between *shareholders, managers (managers) of the company, creditors, government,*

*employees, as well as other internal and external stakeholders related to rights their rights and obligations or in other words a system that directs and controls the company".* hal ini serupa dengan definisi yang dijabarkan oleh Monks & Winow (2009) dimana *corporate governance* merupakan hubungan antara berbagai partisipan dalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk menentukan kemana orientasi perusahaan akan beraktifitas dan seberapa baik kinerja perusahaan dalam melaksanakan operasionalnya. Menurut Monks & Winow (2009) yang dimaksudkan dengan partisipan pada definisi diatas adalah pemilik saham, manajemen, dan direksi yang ditunjuk sebagai pengatur dan pengontrol dari kebijakan yang telah ditentukan. Berdasarkan definisi ini *corporate governance* dapat dilihat secara luas sebagai suatu sistem dan proses yang dibangun dengan tujuan agar terjadi keselarasan tujuan dan juga sebagai bentuk pengendalian atas manajemen perusahaan secara transparan, adil, dengan berbagai stakeholder baik yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung.

Konsep pengelolaan organisasi dengan pendekatan *Good Corporate Governance* dikarenakan berbagai problematika tata kelola organisasi mulai dari masalah *fraud* yang terjadi dalam internal organisasi, benturan kepentingan setiap *stakeholder* hingga mengancam eksistensi organisasi, hingga korupsi yang dilakukan pejabat yang berwenang pada sektor pemerintahan.

Sehubungan dengan praktik manajemen laba yang menjadi permasalahan agensi yang melibatkan pemilik saham dan *stakeholder* lainnya dengan manajemen perusahaan, *corporate governance* memanfaatkan struktur tata kelola perusahaan yaitu ukuran dan kualitas independensi dari dewan direksi dan komite audit). Agyei-Mensah (2017) dalam penelitiannya terkait *corporate governance* dan *forward looking information disclosure* menjelaskan kualitas dan ukuran dewan direksi yang dimiliki oleh suatu perusahaan memberikan pengaruh

terhadap kebijakan perusahaan dengan tujuan untuk melaksanakan asas transparansi bagi setiap pihak yang memiliki kepentingan pada perusahaan tersebut, hal ini ditopang dengan kualitas audit yang diterapkan oleh perusahaan baik secara internal (komite audit) serta eksternal (kantor akuntan publik), fungsi pengawasan dan pengontrolan yang dilakukan untuk setiap perencanaan hingga pelaksanaan atas aturan dan kebijakan perusahaan yang ditetapkan diharapkan dapat menutup potensi praktik–praktik kecurangan yang mungkin dilakukan oleh manajemen perusahaan khususnya kecurangan pada pelaporan keuangan mereka.

## 2.7 Tinjauan Empiris

Sebagai bahan perbandingan sekaligus penunjang pada penelitian ini, berikut dapat dilihat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi sehubungan dengan topik dan variabel dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa inkonsistensi yang ditemukan dalam hasil dan kesimpulan penelitian yang dilakukan baik secara parsial maupun keseluruhan dalam pengujian hipotesis.

Sehubungan dengan korelasi antara biaya agensi (*agency cost*) dan manajemen laba (*earning management*) beberapa penelitian memberikan hasil serupa seperti penelitian yang dilakukan oleh Putra *et al.* (2018) dimana praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan–perusahaan di negara asia tenggara dipengaruhi oleh biaya agensi (*agency cost*) yang diukur dari tingkat budaya nasional dan tingkat persepsi korupsi yang terjadi pada negara dimana perusahaan tersebut beroperasi. Penelitian yang memberikan hasil serupa dilakukan oleh Boateng *et al.* (2018) dimana tingkat budaya nasional (*national culture*) yang dimiliki oleh suatu negara mempengaruhi bagaimana perusahaan



yang beroperasi pada negara tersebut sehubungan dengan pencegahan praktik-praktik kecurangan khususnya pada pengungkapan laporan keuangan, hasil penelitian menyimpulkan budaya nasional dan pencegahan korupsi yang dilakukan pada negara tersebut mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh perusahaan sehubungan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Pada aspek *maintain reputation* yang menjadi salah satu dari tujuan manajemen laba (*earning management*), Deephouse *et al.* (2016) dalam penelitiannya memberikan hasil dimana budaya nasional secara signifikan mempengaruhi secara signifikan reputasi perusahaan yang bertujuan dalam peningkatan nilai (*value*) perusahaan.

Pada penelitian terkait hubungan *good corporate governance* dan manajemen laba. Agustia (2013) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa *corporate governance* dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, dimana hasil yang berbeda diberikan oleh Yimenu *et al.* (2019) dimana hasil penelitian menunjukkan praktik tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dari perspektif *agency theory* mempengaruhi secara signifikan pencegahan praktik manajemen laba pada perusahaan. Berdasarkan *agency theory*, praktik tata kelola perusahaan menjadi opsi yang dipilih oleh pemilik perusahaan dalam mengawasi aktivitas perusahaan yang dijalankan oleh manajemen.

Pada penelitian terkait pengaruh biaya agensi dalam hubungan *good corporate governance* dan manajemen laba. Penelitian yang dilakukan Huu Nguyen *et al.* (2020) memberikan hasil dimana praktik tata kelola yang dilakukan oleh perusahaan dalam mencegah praktik manajemen perlu ditunjang dengan biaya-biaya yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap manajemen sejalan dengan operasional perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan

yang dilakukan Boateng (2018) dimana praktik-pratik kecurangan dalam perusahaan dapat dicegah dengan melaksanakan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan juga melakukan fungsi pengawasan yang transparan dan independen sehingga mendorong pemilik perusahaan perlu mengeluarkan biaya yang lebih dikenal dengan biaya agensi (*agency cost*) dimana besaran biaya yang ditentukan juga oleh faktor eksternal diluar perusahaan.